



KR-Antara/Yusuf Nugroho

MAHASISWA MENGAJAR: Mahasiswa mengajar siswa dengan alat belajar Monopoli Matematika (Politika) di rumahnya di Desa Bahalan Krapyak, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (23/7). Sebanyak empat mahasiswa Universitas Muria Kudus (UMK) sekaligus pencipta alat Monopoli Matematika itu mengajar dengan berkeliling ke rumah siswa sebagai bentuk peduli kepada siswa yang tidak bisa belajar di sekolah.

SEJAK JANUARI MASUK DPO

Perburuan Harun Masiku Diperpanjang

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa pencegahan atau bepergian ke luar negeri terhadap Harun Masiku terhitung sejak 10 Juli sampai enam bulan ke depan. Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebutkan, KPK terus memaksimalkan mencari keberadaan tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

"Sekarang ini, KPK terus memaksimalkan pencarian keberadaan DPO (Harun Masiku)," kata Ali Fikri di Jakarta, Kamis (23/7). Seperti diberitakan, KPK telah mengeluarkan permintaan pencegahan keluar negeri terhadap Harun Masiku yang merupakan tersangka kasus suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk yang kedua kalinya.

Berdasarkan Pasal 97 UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, permintaan cegah hanya bisa dilakukan selama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama

enam bulan berikutnya. Adapun, permintaan pencegahan hanya bisa dilakukan dua kali. Dengan demikian, Harun bisa bebas bepergian ke luar negeri bila tak kunjung diringkus KPK dalam kurun enam bulan ke depan.

Terkait hal itu, Ali mengungkapkan, KPK telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri, Interpol dan Ditjen Imigrasi untuk mencari tersangka Harun, Ia telah dimasukkan dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Januari 2020. Namun, KPK memastikan penyidikan terhadap Harun tetap berjalan.

Dalam kasus ini, salah satu tersangka yakni Saeful Bahri telah dijatuhi vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dengan pidana satu tahun dan delapan bulan penjara ditambah denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan karena terbukti ikut menyuap bekas Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp 600 juta. Saeful dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama Harun memberikan suap kepada Wahyu. (Fu)-f

KOMITE COVID-19 DAN PEN

Tetap Prioritaskan Kesehatan

JAKARTA (KR) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap memprioritaskan kebijakan penanganan kesehatan masyarakat, tetapi tidak meninggalkan kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan masalah sosial.

"Tidak benar kalau Pemerintah berfokus pada sektor ekonomi saja. Tetapi, sektor kesehatan menjadi prioritas dengan tidak meninggalkan sektor ekonomi dan sosial, dan keuangan," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7).

Menurut mantan Panglima TNI itu, dalam struktur Komite Penanganan Covid-19 dan PEN sudah jelas terdapat Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang memiliki tugas dan kewenangan seperti Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam Peraturan Presiden No-

mor 82 Tahun 2020 tentang Komite Kebijakan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pun, ujar Moeldoko, Pemerintah telah mengatur keberadaan dan wewenang dari Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Doni memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah pandemi Covid-19.

"Dalam struktur jelas, tugas fungsi dan peran Pak Doni selaku mantan Ketua Gugus Tugas tetap melekat dalam organisasi yang baru," ujarnya.

Ke depannya, keseimbangan antara program penanganan kese-

hatan masyarakat dan ekonomi akan terlihat jelas dalam program-program yang dihasilkan Komite Penanganan Covid-19 dan PEN.

Program itu akan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, agar tetap menjaga keseimbangan antara rem dan gas dalam penanganan masalah kesehatan dan ekonomi. "Semuanya disiapkan dengan baik dan tak perlu wah ini pemerintah condong ke ekonomi, abai ke kesehatan, tidak ya," ujarnya.

Moeldoko mengatakan, Komite Kebijakan Covid-19 dan PEN juga bisa meminta bantuan aparat TNI dan Polri. Misalnya, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo atau para kepala daerah bisa meminta dukungan aparat TNI dan Polri untuk mengendalikan situasi pandemi Covid-19.

"TNI ada UU Operasi Militer selain perang, di Pasal 7 dalam UU 34 (Undang Undang Nomor 34

Tahun 2004 tentang TNI) sudah jelas tugas-tugas perbantuannya. Jadi mau dimasukkan ke Gugus Tugas atau tidak, begitu TNI diminta sudah otomatis. Polisi juga demikian. Tugas fungsi itu melekat pada berbagai peran negara untuk atas situasi," ujar Moeldoko.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 82 Tahun 2020 tentang Komite Kebijakan Covid-19 dan PEN. Melalui Perpres itu, Pemerintah membentuk tiga unsur yakni Komite Kebijakan terkait Penanganan Covid-19 dan PEN, Satgas Penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga menyatakan, pemerintah tetap memprioritaskan penanganan Covid-19 di bidang kesehatan, meski berusaha untuk menyeimbangkan dengan pemulihan ekonomi. (Ant/Sim)-f

PENYIDIK AKAN TELUSURI

Dugaan Aliran Dana Djoko Tjandra

JAKARTA (KR) - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Kepolisian Indonesia Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, tidak menutup kemungkinan penyidik akan menelusuri dugaan aliran dana dari buronan Djoko Tjandra terkait surat jalan yang dikeluarkan bekas Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNs Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetyo Utomo. "Nanti pasti berkembang terus (menelusuri dugaan aliran dana Djoko Tjandra)," kata Ramadhan, di Jakarta, Kamis (23/7).

Ia mengatakan, saat ini penyidikan masih berkisar pada dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan jabatan. Ditegaskan, Bareskrim Polri akan mengusut kasus dugaan pemalsuan surat jalan untuk Djoko Tjandra secara terbuka. Setiap perkembangan pengusutan kasus akan disampaikan ke publik.

"Pada prinsipnya penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jadi apapun yang dilakukan, kami akan sampaikan. Tentunya melalui tahapan-tahapan," ujarnya.

Utomo telah dicopot dari jabatannya dan digeser ke Bagian Yanma Polri dalam rangka pemeriksaan. Mutasi jabatan itu buntut dari penerbitan surat jalan Utomo untuk buronan Djoko Tjandra atas inisiatif sendiri tanpa seizin pimpinan. Atas perbuatannya, Utomo yang adalah penegak hukum akan dikenakan sanksi kode etik Polri sanksi disiplin dan sanksi pidana. (Ant)-f

SELAMA VAKSIN COVID-19 BELUM TERSEDIA

Taati Protokol Kesehatan Jadi Keharusan

JENEWA (KR) - Sebagai salah satu alat untuk menekan penyebaran Covid-19, penelitian dan pengembangan vaksin virus Korona jenis baru diharapkan bisa segera selesai dan diproduksi untuk masyarakat luas. Namun, World Health Organization (WHO) memperingatkan bahwa vaksin Covid-19 belum bisa diproduksi lebih cepat hingga awal 2021. Sebab, hingga kini sejumlah vaksin yang diteliti baru memasuki uji coba fase ketiga.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Program Darurat Kesehatan WHO Dr Michael Ryan dalam konferensi pers rutin WHO, Rabu (22/7) waktu setempat yang diikuti KR. Ia mengatakan, sejumlah vaksin ini belum bisa diproduksi massal dan harus melalui uji coba lebih lanjut.

Para saintis memang berburu dengan waktu untuk menemukan vaksin Covid-19 untuk melindungi miliaran orang. Sebanyak 24 vaksin telah dites untuk manusia dan lebih

dari 140 vaksin masuk ke dalam percobaan klinis. "Kita melakukan progres yang bagus. Secara realistis, itu akan menjadi bagian pertama di awal tahun sebelum kita melihat orang-orang divaksinasi," jelasnya. Ia juga memuji vaksin dari Universitas Oxford, Inggris yang dinilai sukses melawan Covid-19 dan akan segera diuji coba ke lebih banyak orang. "Kita harus adil karena ini adalah barang global. Vaksin pandemi ini tidak untuk si kaya atau si miskin, ini untuk kita semua," jelas Ryan.

Ahli Mikrobiologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof dr Tri Wibawa PhD SpMK(K) menyebutkan, efektivitas vaksin Covid-19 buatan Cina pada orang Indonesia belum diketahui. Maka, adanya uji klinis yang masuk fase tiga ini adalah langkah untuk mengetahui efektivitas vaksin dalam mencegah Covid-19. "Dari uji klinis fase tiga ini nantinya bisa dilihat

apakah itu cukup aman dan bisa membangun antibodi untuk bisa melindungi orang Indonesia atau tidak," terangnya.

Prof Tri menjelaskan, dua fase uji coba sebelumnya telah dilakukan di Cina. "Lalu, fase tiga ini dilakukan pada populasi yang spesifik akan dilindungi yakni Indonesia, dilihat cukup aman dan bisa melindungi atau tidak. Kalau ternyata hasilnya tidak efektif maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak akan mengeluarkan izin edar ke masyarakat," paparnya.

Apabila vaksin lolos pada fase tiga, maka dilanjutkan dengan uji klinis fase empat. Pada fase ini dilakukan pengawasan untuk melihat efek jangka panjang vaksin. Jika saat peredarannya di masyarakat muncul efek samping maka vaksin akan ditarik kembali. "Selama belum ada vaksin dan obat yang efektif, jalan satu-satunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan," tandas Prof Tri. (R-1/Dev/Sim)-f

DATA LPSK SOAL PERLINDUNGAN ANAK

2016-2020 Terdapat 926 Permohonan

JAKARTA (KR) - Permohonan perlindungan terhadap anak yang diterima Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sejak 2016 sampai Juni 2020 jumlahnya mencapai 926. Asal permohonan tertinggi, menurut Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, adalah Jabar, DKI Jakarta dan Sumatera Utara.

Dalam keterangan persnya, Kamis (23/7) di Jakarta, Edwin menyebutkan, dari jumlah 926 permohonan perlindungan terhadap anak, 482 di antaranya adalah korban kekerasan seksual. Selain itu, 133 korban perdagangan orang, 106 korban eksploitasi perdagangan seksual dan sisanya berasal dari berbagai kasus yang menempatkan anak sebagai korban. Edwin mengatakan, dalam kesempatan ini LPSK menyoroti tentang permohonan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi perdagangan seksual.

Diungkapkan Edwin, LPSK berdasarkan daerah asal korban, anak yang dilindungi (AYLA) banyak yang berdomisili di Jabar, diikuti Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta. Sedangkan, berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana AYLA, DKI

Jakarta berada di tempat teratas, diikuti Jatim dan Jabar.

Sedangkan, tingkat pendidikan, sebagian besar AYLA tidak menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun, bahkan ada yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan SD. Pada umumnya, AYLA yang ingin bekerja, mendapatkan informasi pekerjaan dari teman, media sosial, kerabat dan agen/perekrut. "Mereka pada awalnya dijanjikan bekerja sebagai pramusaji, pemandu karaoke, penjaja toko dan lainnya dengan janji penghasilan yang memadai," kata Edwin.

Namun kenyataannya, anak-anak tersebut dieksploitasi saat bekerja, dengan dipekerjakan 10 hingga 16 jam per hari dan melayani sekitar 10 tamu. Mereka dijanjikan penghasilan Rp 1 juta hingga Rp 20 juta per bulan. Padahal, jauh panggang dari api, karena di antara mereka bahkan tidak mendapatkan upah sama sekali.

"Mereka juga dipaksa untuk meminimalkan pil KB atau obat kontrasepsi, sehingga dapat dieksploitasi secara terus menerus tanpa terhalang siklus menstruasi," tutur Edwin. (Fu)-f

PROYEKSI EKONOMI GLOBAL

Pertumbuhan Minus Dialami Banyak Negara

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, proyeksi ekonomi global dan sejumlah negara di dunia selama pandemi Covid-19 isinya hanya minus. Pertumbuhan ekonomi yang minus mungkin akan dialami banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam acara Penyaluran Dana Bergulir untuk Koperasi Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, di Istana Negara Jakarta, Kamis (23/7).

"Bayangkan (ekonomi) isinya hanya minus, minus, minus, minus, minus dan minusnya adalah dalam posisi yang gede-gede," kata Presiden Jokowi.

Kondisi minus ekonomi diprediksi Presiden Jokowi juga bisa terjadi di Indonesia. Ia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2020 ini akan merosot tajam. Prediksinya pertumbuhan ekonomi pada kuartal II minus 4,3 persen hingga minus 5 persen.

Angka ini merosot jauh dari capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2020 yang sebesar 2,97 persen. "Kita Indonesia di kuartal I masih plus, se-

belumnya kita plus 5 persen. Kuartal I 2020 plus 2,97 persen, tapi di kuartal II kita sudah jatuh minus. Kita harus ngomong apa adanya, bisa minus 4,3 persen sampai mungkin (minus) 5 persen," jelas Presiden Jokowi.

Sementara itu, sejumlah upaya terus dilakukan pemerintah pusat untuk memulihkan sektor perekonomian. Salah satunya dengan pemberian dana bergulir lewat Kementerian Koperasi dan UKM RI. Acara yang diinisiasi Kementerian Koperasi dan UKM ini dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta dan dipimpin Presiden Jokowi. Acara secara virtual ini juga diikuti Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Ruang nDalem Ageng, Kompleks Kepatihan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Drs Tri Saktiyana MM mengatakan, pemberian dana bergulir ini kebijakan pemerintah pusat untuk membantu koperasi dan UMKM. Pemerintah pusat telah menyediakan dana Rp 1 triliun. Dana tersebut dikelola Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. (Sim/Ria)-f

KEMBANGKAN BERSAMA DESA-DESA BUDAYA

Jadikan Pantai Selatan Halaman Muka DIY

YOGYA (KR) - Dinas Kebudayaan (Disbud) atau Kundha Kabudayaan DIY dan Dewan Kebudayaan DIY diminta bersinergi untuk bersama-sama mengembangkan kawasan Pantai Selatan dan mengangkat potensi desa-desa budaya yang ada di DIY. Pengembangan dan pemanfaatan seluruh potensi di kawasan Pantai Selatan serta desa-desa budaya di DIY tersebut demi mewujudkan kemashlahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Disbud atau Kundha Kabudayaan DIY Aris Eko Nugroho mengatakan, pembentukan Dewan Kebudayaan DIY sesuai amanat Pasal 30 Perdas No 3 Tahun 2017 dan diperkuat dengan Perub DIY tentang Dewan Kebudayaan serta diperbarui pembentukan SK berkaitan dengan personel



KR-Franz Boedisoekamanto

Aris Eko Nugroho dan Djoko Duiyanto saat memberikan keterangan pers.

Dewan Kebudayaan DIY yang mempunyai masa kerja kurang lebih 2,5 tahun mulai 2020 hingga 2022 nanti.

"Pak Gubernur mengarahkan agar kita melihat Pantai Selatan sebagai halaman muka DIY yang sebelumnya sudah lama dikembangkan. Namun kenyataannya sampai seka-

rang masih menjadi bagian yang dipertanyakan, termasuk potensi masing-masing desa terutama desa budaya yang menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus kami kerjakan," ujar Aris usai Pengarahan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedung Pracomono Kepatihan, Kamis (23/7).

Aris menyampaikan, kawasan Pantai Selatan DIY yang memiliki potensi kekayaan bahari ini harus digarap serta dilengkapi fasilitas kapal, cold storage hingga mekanisme pelelangan iklan dan sebagainya.

Ketua Dewan Kebudayaan DIY Dr Djoko Duiyanto mengungkapkan, Dewan Kebudayaan DIY siap bersinergi dengan Pemda untuk mengawal Keistimewaan DIY. Apalagi dalam struktur kepengurusan Dewan Kebudayaan ada kenaikan cukup signifikan. Dari sebelumnya 13 orang bertambah menjadi 32 orang karena amanat UU. Dalam struktur organisasi Dewan Kebudayaan ada sekelompok yang berposisi sebagai bidang pertambangan dan bidang kultural. (Ira/Ria)-d